

**RELOKASI PERMUKIMAN, KANTOR PEMERINTAHAN DAN
FASILITAS PUBLIK PASCA BENCANA MERAPI 2010
(Studi di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman)**

SKRIPSI



**Oleh:
NOVRIANSYAH ROSYID HERMAWAN
NIM. 10192536
JURUSAN PERPETAAN**

**PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRACT

RELOCATION OF SETTLEMENT, GOVERNMENT OFFICES AND PUBLIC FACILITY POST MERAPI ERUPTION IN 2010 (Study at Cangkringan Sub District, Sleman District)

The damage caused by the Merapi eruption in 2010 impacted on the settlement, infrastructure and public facility sectors at Cangkringan sub district. After the Merapi eruption in 2010, the government created Disaster-Prone Area Map. The most dangerous area is Disaster-Prone Area III, hence this area is the most forbidden area to be inhabited. In connection with the term above, the government performs settlement, government office and public facility relocation in Cangkringan sub district. The aims of this research were to discover the process of housing, government office and public facility relocation after the Merapi eruption in 2010 in Cangkringan sub district, Sleman district and also do comprehend the impact caused by the relocation.

This research was performed by using qualitative method with phenomenology approach. The informants screening technique was using purposive sampling technique due the researcher required in-depth information from the right person according to the researcher. The data collection technique the researcher performed was by using (1) Observation, it was performed by observing and recording the phenomenons existing at the relocation object, (2) Interviews, it was performed by holding questions answer directly with the Regional Disaster Management Agency, General and Housing Affairs Agency, Land Office, Regional Land Controlling Agency of Sleman District, Cangkringan Subdistrict and Village Government, Chief of Hamlet and surrounding community, (3) Documentary study, it was performed against the documents, maps, archives and epistles, as well as list of land procurement regulation and disaster management.

The research result suggested that the process of relocation through the discharge of land village treasury consisting the location determination, formation of land procurement committee, inventory and identification of the plot, compensation appraisal, determination deliberation and compensation granting, discharge of land village treasury and replacement land procurement has been followed up by certificating the plots. Beside through discharging the land village treasury, for the relocation of government offices and public facilities there was also by performing leasing and change of land village treasury designation. The relocation was also succeeded in providing a positive impact on the environmental ecology at the permanent residence or abandoned Disaster-Prone Area III. At the social aspect the relocation has been assessed as successful in maintaining the social condition and tended to have an increase. At the economic aspect the relocation also gave a positive impact because its capability in increasing the community's economic.

Key Words: relocation, settlement, Merapi Disaster-Prone Area

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	vii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penulisan	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kebaruan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Landasan Teori	14
1. Kawasan Rawan Bencana Merapi	14
2. Relokasi	20
3. Permukiman.....	23
4. Kantor Pemerintahan	25
5. Fasilitas Publik.....	27
6. Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	28
7. Perizinan Pemanfaatan Tanah Kas Desa	30
8. Dampak Ekologi, Sosial, dan Ekonomi	33
B. Kerangka Pemikiran.....	36
C. Pertanyaan Penelitian	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Teknik Penjaringan Informan	43
F. Teknik Analisis Data.....	44

	Halaman
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH	46
A. Kondisi Geografis Wilayah.....	46
B. Kondisi Kependudukan.....	50
C. Potensi Ekonomi dan Wisata	52
D. Kondisi Sosial Budaya	54
BAB V PROSES RELOKASI	55
A. Pengadaan Tanah	55
1. Pengadaan Tanah untuk Hunian Tetap	55
2. Pengadaan Tanah untuk Kantor Pemerintahan dan Fasilitas Publik.....	80
B. Pembangunan Fisik	89
C. Sertifikasi Tanah Relokasi	101
1. Sertifikasi Tanah Relokasi Permukiman (Hunian Tetap).....	101
2. Sertifikasi Tanah Relokasi Kantor Pemerintahan dan Fasilitas Publik.....	106
BAB VI DAMPAK RELOKASI.....	107
A. Dampak Ekologi.....	107
1. Dampak Ekologi di Hunian Tetap.....	107
2. Dampak Ekologi di Lokasi Awal	111
B. Dampak Sosial	114
C. Dampak Ekonomi.....	120
BAB VII PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Gunung Merapi merupakan salah satu gunung teraktif di dunia. Gunung ini terletak antara dua provinsi yakni Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Penduduk yang tinggal di sekitar Gunung Merapi cukup padat. Namun demikian beberapa kawasan dinyatakan tidak layak dijadikan daerah permukiman karena ancaman bahaya erupsi Gunung Merapi yang sewaktu-waktu bisa mengancam.

Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral menyebutkan Merapi sebagai gunung api yang seringkali meletus. Kurun waktu hingga Juni 2006 tercatat sudah terjadi 83 kali erupsi. Erupsi 2010 masuk dalam salah satu erupsi besar yang pernah terjadi, bahkan merupakan erupsi terbesar selama 140 tahun terakhir yakni sejak tahun 1870. Erupsi ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan bencana serupa pada lima kejadian sebelumnya, yaitu kejadian pada tahun 1994, 1997, 1998, 2001 dan 2006 (Berdasarkan data Pusdalops BNPB per tanggal 12 Desember 2010).¹

Erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada bulan Oktober-November 2010 telah menimbulkan bencana besar yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan infrastruktur, kerugian harta benda serta korban jiwa dan luka-luka dalam jumlah besar. Berdasarkan data dan informasi dari Posko Aju BNPB di

¹ BAPPENAS – BNPB, *Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah*, 2011, hlm i.

Yogyakarta dan Posko Aju Provinsi Jawa Tengah kejadian bencana erupsi Gunung Merapi tersebut telah mengakibatkan 386 jiwa meninggal dunia. Selain itu, kejadian bencana tersebut juga mengakibatkan 15.366 orang mengungsi yang tersebar di titik-titik pengungsian di kabupaten/kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah. Masyarakat yang mengungsi adalah mereka yang kehilangan tempat tinggal maupun yang berada dalam radius zona bahaya awan panas (< 20 Km).

Tabel 1. Data Korban Erupsi Gunung Merapi

Lokasi	Meninggal			Pengungsi
	Luka Bakar	Non Luka Bakar	Total	
Provinsi DI Yogyakarta*				
Sleman	190	87	277	11.468
Kulon Progo				406
Kota Yogyakarta				461
Bantul				0
Gunungkidul				504
Jumlah DIY	190	87	277	12.839
Provinsi Jawa Tengah				
Kabupaten Magelang				1.094
Kabupaten Klaten				1.363
Kabupaten Boyolali				70
Jumlah Jawa Tengah			109	2.527
Total DIY & Jateng			386	15.366

Sumber : BNPB, 12 Desember 2010

Catatan :

- Korban meninggal karena luka bakar merupakan korban yang meninggal akibat terkena awan panas.
- Korban meninggal non luka bakar merupakan korban yang meninggal akibat sakit jantung, ISPA, kecelakaan, penyakit bawaan dan lain-lain.

Material vulkanik yang dihasilkan dari erupsi berupa awan panas, abu vulkanik, pasir, kerikil, batu-batu kecil dan besar dengan gradasi yang

bervariasi menyebar di sekitar puncak, lereng dan palung sungai. Pada musim hujan 2010/2011, telah terjadi banjir lahar dingin hampir di semua sungai yang berhulu di puncak Merapi. Awan panas dan banjir lahar dingin mengakibatkan kerusakan bangunan kawasan permukiman, lahan pertanian, kawasan perkantoran dan fasilitas publik lainnya.

Kerusakan yang diakibatkan oleh erupsi Gunung Merapi berdampak pada sektor permukiman, infrastruktur, telekomunikasi, listrik dan energi, serta air bersih. Di sektor permukiman, akibat erupsi Gunung Merapi telah mengubur sejumlah dusun di Provinsi DI Yogyakarta dan mengakibatkan ribuan rumah penduduk mengalami kerusakan. Tercatat 2.636 unit rumah rusak berat dan tidak layak huni, 156 rumah rusak sedang, dan 632 rumah rusak ringan, sehingga secara keseluruhan 3.424 rumah di wilayah Provinsi DI Yogyakarta yang mengalami kerusakan dampak erupsi Gunung Merapi.²

Pasca erupsi tahun 2010 dengan memadukan data bahaya erupsi tahun-tahun sebelumnya dihasilkan Peta Kawasan Rawan Bencana oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) melalui Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungpian (BPPTK), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Kawasan Rawan Bencana dibagi menjadi tiga kategori yakni kategori I, II dan III. Kawasan paling berbahaya adalah Kawasan Rawan Bencana (KRB) III, sehingga kawasan ini merupakan daerah yang dilarang untuk dihuni. Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman juga masuk ke dalam tiga kawasan tersebut, yakni KRB I, KRB II dan KRB III.

² Ibid, hlm i.

Permukiman, kantor pemerintahan dan fasilitas publik di wilayah KRB III selanjutnya direlokasi ke tempat yang lebih aman.

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai proses relokasi tersebut serta dampak yang ditimbulkan sehingga peneliti mengambil judul **“Relokasi Permukiman, Kantor Pemerintahan dan Fasilitas Publik Pasca Bencana Merapi 2010 (Studi di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman)”**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan larangan KRB III sebagai daerah permukiman, pemerintah melaksanakan relokasi kepada warga yang tinggal di kawasan tersebut. Untuk menolong masyarakat yang kehilangan tempat tinggal karena bencana tersebut pemerintah dan para donatur pada awalnya mendirikan hunian sementara (*shelter*) yang berukuran 36 meter persegi di atas lahan seluas 64 meter persegi. Lokasi hunian sementara meliputi enam desa yang terletak di Kecamatan Cangkringan dan Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Mulai tahun 2011 pemerintah bersama donatur membangun hunian tetap untuk menggantikan hunian sementara yang akan diberikan kepada korban bencana erupsi Gunung Merapi tahun 2010.

Lokasi hunian tetap antara lain terletak di:

1. Karangkendal, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan;
2. Plosokerep, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan;
3. Batur, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan;

4. Pagerjurang (selatan golf), Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan;
5. Gondang 2, Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan;
6. Gondang 3, Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan;
7. Dongkelsari, Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan;
8. Gading, Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan;
9. Jetis Sumur, Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan;
10. Banjarsari, Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan;
11. Kuwang, Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan;
12. Randusari, Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan;

Relokasi juga dilaksanakan untuk gedung-gedung kantor pemerintahan serta fasilitas publik lainnya. Fasilitas publik berupa gedung-gedung pemerintahan dan sekolah yang berada dalam kawasan rawan bencana Merapi harus dikosongkan. Sebagai gantinya, telah disiapkan tanah kas desa untuk relokasi. Tanah Kas Desa yang disiapkan terletak di Dusun Panggung, Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan. Komplek pemerintahan dan sekolahan yang direlokasi sejak tahun 2012 antara lain Kantor Kecamatan Cangkringan, Kantor Polisi Sektor Cangkringan, Kantor Komando Rayon Militer Cangkringan, Kantor Urusan Agama Cangkringan, Kantor Pos Kesehatan Hewan Cangkringan, Balai Desa Argomulyo dan Kantor Unit Pengelola Teknis Pendidikan Kecamatan Cangkringan, serta satu Sekolah Dasar (SD) yang dipindahkan yaitu SD Negeri Bronggang Baru.³

³ Aloysius Budi Kurniawan. *Fasilitas Publik di Daerah Rawan Erupsi Dikosongkan*, diakses <http://regional.kompas.com/read/2012/01/19/21553769/Fasilitas.Publik.di.Daerah.Rawan.Erups.i.Dikosongkan.>, pada tanggal 17 Desember 2013 pukul 16.00 WIB.

Kebijakan relokasi dari pemerintah merupakan kebijakan yang tepat untuk mengurangi resiko bencana akibat aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Permukiman penduduk dan fasilitas publik di Kecamatan Cangkringan berupa gedung-gedung pemerintahan dan sekolah yang masuk dalam kawasan rawan bencana juga direlokasi ke tempat yang lebih aman dari ancaman bahaya Merapi. Untuk mengetahui bagaimana proses dan dampak dari relokasi tersebut maka penelitian ini perlu dilakukan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. proses relokasi permukiman, kantor pemerintahan dan fasilitas publik pasca bencana Merapi tahun 2010 di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman;
2. dampak yang ditimbulkan akibat relokasi permukiman, kantor pemerintahan dan fasilitas publik di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan berupa sebuah konsep relokasi permukiman, kantor pemerintahan dan fasilitas publik yang baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan.

2. Bagi STPN, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat untuk kajian pertanahan terutama menyangkut relokasi.
3. Bagi BPN dan pemerintah, diharapkan dapat menjadi pijakan dalam pelaksanaan relokasi dan sebagai masukan dalam mengambil kebijakan relokasi permukiman, kantor pemerintahan dan fasilitas publik pasca bencana.

E. Kebaruan Penelitian

Penelitian tentang erupsi Merapi bukan merupakan hal yang baru karena sudah ada penelitian yang dilakukan sebelumnya berkaitan dengan kebijakan relokasi pasca erupsi Merapi tahun 2010. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan bencana erupsi Merapi. Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Kebaruan Penelitian

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Arief S. dan Eko Budi Wahyono (2011)	Relokasi Pasca Bencana Erupsi Merapi Tahun 2010: Sikap warga dan Permasalahan Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sikap warga terhadap kebijakan relokasi? 2. Bagaimana permasalahan pertanahan yang muncul di lokasi bencana pasca erupsi Merapi? 	Deskriptif Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak warga yang enggan direlokasi. 2. Permasalahan pertanahan di lokasi bencana antara lain banyak sertipikat tanah hilang dan batas tanah yang hilang.
2	Ilham Adha Indradeka (2012)	Relokasi Warga Pasca Erupsi Merapi 2010	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor apa yang menjadi hambatan terhadap rencana relokasi? 2. Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dalam menanggulangi permasalahan relokasi? 	Deskriptif Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor yang menjadi hambatan relokasi meliputi faktor internal yaitu ekonomi, tanggung jawab, sosial masyarakat, lingkungan pegunungan, sejarah, kepemilikan, jarak lokasi dan adat istiadat. Faktor eksternal meliputi peraturan perundangan dan dukungan pemerintah. 2. Upaya yang dilakukan yaitu meminimilasi kehilangan kepemilikan, ekonomi, jarak lokasi, menata lingkungan pegunungan dan menyeleraskan peraturan perundangan.

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3	Ibrahim Suyuti (2012)	Studi Pengadaan Tanah untuk Pelurusan Kali Putih di Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang Pasca Erupsi Merapi 2010	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana prosedur pengadaan tanah untuk pelurusan Kali Putih di lokasi bencana lahar dingin pasca erupsi Gunung Merapi 2010? 2. Bagaimana sikap warga terhadap kebijakan relokasi? 	Deskriptif Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pelurusan Kali Putih sesuai Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 melalui pelepasan hak. Prosedur pengadaan tanah dalam keadaan normal tetap dilakukan seperti penyusunan proposal untuk penetapan lokasi, identifikasi, inventarisasi, penilaian ganti rugi dan pelepasan hak. 2. Sikap warga terbagi menjadi dua yaitu pro dan kontra. Faktor keamanan, ekonomi, dan historis menjadi alasan warga baik yang menerima maupun menolak relokasi.
4	Septiyani (2012)	Konsolidasi Tanah Pertanian sebagai Strategi Penataan Pertanahan pada Kawasan Rawan Bencana III Merapi	1. Kebijakan apa yang telah dilakukan pemerintah pasca Erupsi Gunung Merapi 2010, dan strategi penataan pertanahan seperti apa yang tepat dilaksanakan pasca erupsi Gunung Merapi khususnya di Pedukuhan Kaliadem?	Deskriptif Kualitatif	1. Kebijakan yang telah dilaksanakan antara lain pendirian hunian sementara dan hunian tetap bagi korban erupsi Merapi. Selain itu juga telah dilaksanakan rekonstruksi batas dan IP4T.

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>2. Bagaimana analisis SWOT terhadap konsolidasi tanah pertanian sebagai bentuk strategi penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang dapat dilaksanakan di area terdampak langsung khususnya di Pedukuhan Kaliadem?</p> <p>3. Bagaimana merancang konsep atau desain konsolidasi tanah pertanian sebagai strategi penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) yang dapat dilaksanakan di area terdampak langsung khususnya di Pedukuhan Kaliadem?</p>		<p>2. Faktor yang menjadi <i>strengths</i> yaitu adanya keinginan yang besar dari Kantor Pertanahan Sleman. Faktor <i>weakness</i> yaitu belum adanya kesamaan persepsi di Kantor Pertanahan Sleman. Faktor <i>opportunities</i> meliputi karakteristik warga Kaliadem yang taat kebijakan pemerintah, Kawasan Rawan Bencana, dan fisik wilayah Kaliadem yang 100% tertutup material vulkanik. Faktor <i>threats</i> meliputi siklus erupsi Gunung Merapi, Pemerintah Kabupaten Sleman yang lambat melaksanakan strategi penataan, kesulitan yang muncul pada tahapan pelaksanaan konsolidasi tanah dan biaya konsolidasi tanah.</p> <p>3. Dari analisis SWOT dapat disimpulkan konsolidasi tanah pertanian dapat dilaksanakan di Pedukuhan Kaliadem.</p>

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5	Supriyanto (2013)	Pengadaan Tanah dari Tanah Kas Desa untuk Relokasi Korban Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah dari Tanah Kas Desa untuk relokasi korban pasca erupsi Gunung Merapi 2010 pada Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman? 2. Apa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan tanah dari Tanah Kas desa untuk relokasi korban pasca erupsi Gunung Merapi 2010, dan bagaimana upaya penyelesaiannya? 3. Bagaimana dampak sosial ekonomi yang terjadi akibat relokasi korban pasca bencana tersebut ke lokasi yang baru pada masyarakat hunian tetap? 	Deskriptif Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan tanah di lokasi bencana dari Tanah Kas Desa berbeda dengan pengadaan tanah pada umumnya antara lain tidak perlu adanya proposal, ada 2 panitia yaitu Panitia Pelaksana dan Panitia Pengawas, penilaian harga tanah langsung dilaksanakan Panitia Pengadaan Tanah 2. Kendala dan hambatan yang terjadi yaitu perubahan jumlah data penghuni hunian tetap, kesulitan mencari tanah pengganti, dana ganti rugi mengendap di rekening desa. 3. Muncul kesenjangan sosial dalam masyarakat hunian tetap. Dalam sektor ekonomi terjadi perubahan pekerjaan dari pertanian ke peternakan dan jasa. Muncul lapangan kerja baru pada lokasi Wisata <i>Volcano Tour</i> berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat.

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
6	Novriansyah Rosyid Hermawan (2014)	Relokasi Permukiman, Kantor Pemerintahan dan Fasilitas Publik Pasca Bencana Merapi 2010 (Studi di Kec. Cangkringan, Kab. Sleman)	<p>1. Bagaimana proses relokasi permukiman, kantor pemerintahan dan fasilitas publik pasca bencana Merapi 2010 di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman?</p> <p>2. Apa saja dampak yang ditimbulkan akibat relokasi permukiman, kantor pemerintahan dan fasilitas publik di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman?</p>	Kualitatif Fenomenologi	<p>1. Proses relokasi permukiman melalui pelepasan Tanah Kas Desa telah ditindaklanjuti melalui sertifikasi bidang-bidang tanah. Selain melalui pelepasan Tanah Kas Desa, untuk relokasi kantor pemerintahan dan fasilitas publik ada juga yang melalui sewa menyewa dan perubahan peruntukan Tanah Kas Desa.</p> <p>2. Relokasi berhasil memberikan dampak yang positif terhadap ekologi lingkungan di hunian tetap maupun lokasi Kawasan Rawan Bencana III yang ditinggalkan. Pada aspek sosial relokasi dinilai berhasil dalam mempertahankan kondisi sosial dan cenderung mengalami peningkatan. Pada aspek ekonomi relokasi memberikan dampak yang positif karena mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.</p>

Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa dalam penelitian ini lebih difokuskan untuk relokasi permukiman, kantor pemerintahan dan fasilitas publik di Kecamatan Cangkringan yang terdiri dari 5 desa yaitu Glagaharjo, Argomulyo, Wukirsari, Umbulharjo dan Kepuharjo yang belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya menyangkut hal-hal seperti masalah pengadaan tanah, pembangunan fisik dan sertifikasi bidang-bidang tanah. Di samping itu dampak relokasi yang diteliti meliputi dampak ekologi, sosial dan ekonomi

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap program relokasi permukiman, kantor pemerintahan dan fasilitas publik di Kecamatan Cangkringan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses relokasi permukiman, kantor pemerintahan dan fasilitas publik di Kecamatan Cangkringan telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 11 Tahun 2012 meliputi penetapan lokasi, pembentukan panitia pengadaan tanah, inventarisasi dan identifikasi bidang tanah, penilaian ganti rugi, musyawarah penetapan dan pemberian ganti rugi, pelepasan tanah kas desa dan pengadaan tanah pengganti.
 - a. Dalam pembangunan permukiman untuk hunian tetap, pengadaan tanah dilakukan melalui pelepasan Tanah Kas Desa. Sementara untuk pembangunan kantor pemerintahan dan fasilitas publik melalui pelepasan, sewa menyewa dan perubahan peruntukan Tanah Kas Desa.
 - b. Kendala yang dihadapi dalam pelepasan Tanah Kas Desa di Kecamatan Cangkringan adalah tidak semua desa dapat menyediakan tanah pengganti sehingga dana ganti rugi pelepasan Tanah Kas Desa dijadikan dana abadi desa.

- c. Dalam pelaksanaan pembangunan hunian tetap, ada beberapa lokasi hunian tetap yang masuk dalam wilayah Kawasan Rawan Bencana III.
2. Dampak relokasi permukiman, kantor pemerintahan dan fasilitas publik di Kecamatan Cangkringan meliputi dampak ekologi, sosial dan ekonomi.
 - a. Konsep *eco-settlement* dan *living harmony with disaster risk* dalam pembangunan hunian tetap berdampak positif dalam kelestarian ekologi/lingkungan. Relokasi berhasil meningkatkan kualitas permukiman layak di lokasi hunian tetap. Relokasi juga berdampak baik terhadap lingkungan lokasi awal di Kawasan Rawan Bencana III.
 - b. Kehidupan sosial masyarakat saat ini dapat dikatakan lebih baik dari sebelumnya karena saat ini masyarakat tinggal bersama dalam satu kompleks hunian tetap yang jarak antar rumahnya saling berdekatan.
 - c. Dalam sektor ekonomi, banyak warga yang kehilangan mata pencaharian sehingga terjadi perubahan beberapa lapangan pekerjaan yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.

B. Saran

Adapun saran atau rekomendasi yang dapat kami berikan adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi terhadap proses relokasi:
 - a. Pelaksanaan pengadaan tanah dari Tanah Kas Desa di Kecamatan Cangkringan ini dapat dijadikan sebagai alternatif bagi daerah lain yang sering mengalami bencana di Indonesia.

- b. Pemerintah Desa Umbulharjo, Kepuharjo dan Wukirsari perlu melakukan usaha lebih dalam mencari tanah pengganti Tanah Kas Desa yang dilepaskan untuk pembangunan hunian tetap.
 - c. Diperlukan revisi Peta Kawasan Bencana Merapi oleh Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengeluarkan lokasi hunian tetap dari wilayah Kawasan Rawan Bencana III.
2. Rekomendasi terhadap dampak relokasi yaitu pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di hunian tetap.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi:

- BAPPENAS – BNPB. 2011. *Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah*. Jakarta
- Cresswell, John W. 2010. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman. *Tanah Kas Desa*, dalam <http://dppd.slemankab.go.id/tanah-kas-desa>, diunduh pada tanggal 17 Desember 2013 pukul 17.00 WIB
- Indradeka, Ilham Adha. 2012. *Relokasi Warga Pasca Erupsi Merapi 2010*. Skripsi, Program DIV STPN Yogyakarta
- Irwan, Zoer'aini Djamal. 2003. *Prinsip-prinsip Ekologi dan Organisasi Ekosistem Komunitas dan Lingkungan*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi*, dalam http://jdih.slemankab.go.id/?mod=detail_berita&id=124 diunduh tanggal 17 Desember 2013 pukul 17.28 WIB
- Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya Republik Indonesia. 2013. *Pendampingan yang Mencerahkan: Catatan Pendampingan Rehabilitasi & Rekonstruksi Pascaerupsi Merapi 2010 oleh Rekompak-Cipta Karya*. Jakarta : Kementerian PU
- Kronologis Letusan Dahsyat Merapi*, dalam <http://www.tngunungmerapi.org/kronologis-letusan-dahsyat-merapi/> diunduh tanggal 17 Desember 2013 pukul 16.45 WIB
- Kurniawan, Aloysius Budi. 2012. *Fasilitas Publik di Daerah Rawan Erupsi Dikosongkan*, dalam <http://regional.kompas.com/read/2012/01/19/21553769/Fasilitas.Publik.di.Daerah..Rawan.Erupsi.Dikosongkan>. diunduh 17 Desember 2013 pukul 16.00 WIB
- Lestari, Astri dan Arya Hadi Dharmawan. 2011. *Dampak Sosio-Ekonomis dan Sosio-Ekologis Konversi Lahan, Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia | April 2011*. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB

- Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Musthofa, Zaini. 2011. *Evaluasi Program Relokasi Permukiman Kumuh: Tugas Akhir Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, dalam <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> diunduh tanggal 17 Desember 2013 pukul 16.00 WIB
- Soemardjono, Maria SW. 2009. *Kebijakan Pertanahan (Antara Regulasi dan Implementasi)*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Septiyani. 2012. *Konsolidasi Tanah Pertanian sebagai Strategi Penataan Pertanahan pada Kawasan Rawan Bencana III Merapi*. Skripsi, Program DIV STPN Yogyakarta
- Straus, Anselm dan Juliet Corbin. 2013. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta
- Supriyanto. 2013. *Pengadaan Tanah dari Tanah Kas Desa untuk Relokasi Korban Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010*. Skripsi, Program DIV STPN Yogyakarta
- Suyuti, Ibrahim. 2012. *Studi Pengadaan Tanah untuk Pelurusan Kali Putih di Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang Pasca Erupsi Merapi 2010*. Skripsi, Program DIV STPN Yogyakarta
- Syafii, Inu Kencana. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Syaifullah, Arief dan Eko Budi W. 2012. *Relokasi Pasca Erupsi Merapi 2010: Sikap Warga dan Permasalahan Pertanahan*. *Jurnal Bhumi STPN Nomor 7 Tahun 4, September 2012*, Yogyakarta : STPN

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pengelolaan Tanah Kas Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031

Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana